

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. TINJAUAN TEORI

1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan sebuah informasi yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut untuk segala jenis kegiatan dan juga untuk menentukan keputusan. Tujuan utama akuntansi adalah untuk menghasilkan atau menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan uraian di atas, pengertian akuntansi secara sederhana adalah kegiatan menyajikan informasi ekonomi kepada banyak pihak yang memerlukan.

Oleh karena itu, diperlukan cara pencatatan yang sistematis agar dapat menganalisis transaksi keuangan menjadi informasi ekonomi yang berguna. Informasi akuntansi biasanya digunakan oleh investor, kreditor, pemerintah, karyawan, juga manajer atau pemimpin perusahaan. Informasi tersebut berguna bagi mereka sebagai dasar pengambilan keputusan serta sebagai bukti pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik, di samping bukti untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun. Dengan demikian, manfaat akuntansi adalah untuk mendapatkan informasi keuangan perusahaan, untuk bukti pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik dan untuk mengetahui perkembangan suatu perusahaan

Laporan Akuntansi berfungsi untuk menjadi sebuah rekaman laporan yang mencatat atau merekam transaksi secara sistematis dan kronologis. Menjaga dan Melindungi Properti Akuntansi berfungsi untuk menghitung jumlah realitas dari penyusutan aset yang dimiliki suatu perusahaannya secara nyata. Berfungsi untuk merancang dan mengembangkan sistem seperti menjaga catatan dan pelaporan hasil yang

nantinya akan selalu memenuhi persyaratan hukum. Pengertian Akuntansi menurut beberapa Tokoh Ekonomi

a. Definisi menurut AAA

Menurut American Accounting Association (AAA) dalam Dwi Harti (2009:4) adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

b. Definisi menurut AICPA

Akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) adalah proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi kejadian yang tepat (berdaya guna) dalam bentuk satuan uang dan penafsiran hasil proses tersebut.

c. Definisi menurut Menurut Soemarso S.R

Menurut Soemarso S.R (2009:3) akuntansi adalah media komunikasi, oleh karena itu sering disebut sebagai “bahasanya dunia usaha” (business of language). Akuntansi akan menghasilkan informasi yang berguna baik bagi pihak-pihak yang menyelenggarakannya maupun pihak-pihak luar. Kegunaan tersebut terutama berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban.

d. Definisi menurut Rusdianto

Menurut Rusdianto (2012:16) akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas dan melaporkan transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan.

e. Definisi menurut S. Carl Warrent, dkk.

S. Carl Warrent, dkk (2017:3) mendefinisikan akuntansi adalah sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Sistem informasi mengumpulkan dan memproses data-data

yang berkaitan dan kemudian menyebarkan informasi keuangan kepada pihak yang tertarik.

f. Akuntansi adalah “bahasa bisnis” (language of business) karena melalui akuntansi lah informasi bisnis dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan.

2. Proses Akuntansi

Tahapan akuntansi pada entitas nonlaba hampir sama dengan siklus akuntansi pada umumnya. Menurut Halim dan Kusufi (2013), tahapan akuntansi dikelompokkan dalam tiga tahap, adalah sebagai berikut :

- a. Tahap pencatatan, terdiri dari kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk transaksi dan buku pencatatan, kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku jurnal, dan memindah bukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.
- b. Tahap pengikhtisaran, terdiri dari penyusunan neraca saldo berdasarkan akun-akun buku besar, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja, pembuatan ayat jurnal penutup, membuat neraca saldo setelah penutupan, membuat ayat jurnal pembalik.
- c. Tahap pelaporan, yang terdiri dari Laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komperhensif, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

3. ISAK 35 - Pedoman Pelaporan Organisasi Nirlaba

Agar Laporan Keuangan yang dihasilkan dapat dimengerti, dapat diperbandingkan dan tidak menyesatkan, dalam Penyusunan dan Penyajian laporan keuangan terdapat Acuan atau Pedoman nya yaitu : ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.

Di Indonesia Badan yang berwenang dalam merumuskan Standar Tersebut yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) selalu berkembang, sejalan perkembangan dunia usaha.

Ada terdapat 4 tahapan tonggak sejarah paling fenomenal atau paling penting menuju Perkembangan Pelaporan keuangan dalam aturan Standar Akuntansi sampai pada ISAK 35.

1. Menjelang diaktifkannya Pasar Modal tahun 1973.

Menjelang diaktifkannya Pasar Modal tahun 1973, IAI melakukan kodifikasi Prinsip Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku “Prinsip Akuntansi Indonesia “ (PAI).

2. Revisi untuk menyesuaikan Ketentuan Akuntansi

Tahun 1984 komite PAI melakukan revisi dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha, jadilah buku berjudul : “Prinsip Akuntansi Indonesia 1984”

3. Revisi Total terhadap PAI 1984

Tahun 1994, IAI melakukan revisi total terhadap PAI 1984 , dan melakukan kodifikasi dalam buku “Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Oktober 1994, dan penyusunnya dibentuk dalam Komite SAK, dan kemudian mulai tahun 1998 diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK).

Dikatakan revisi total, karena sejak tahun 1994 isi dari standar itu mengacu pada International Accounting Standar (IAS). Mengapa mengacu ke IAS ?, tidak lain karena adanya dinamika dan perubahan lingkungan global agar laporan Keuangan yang dihasilkan mampu memenuhi semua pemakai Laporan Keuangan. Agar Perusahaan juga mempunyai daya saing yang tinggi di kalangan bisnis Internasional.

Dalam perkembangan selanjutnya SAK terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan Standar baru. Para stakeholder bukan sekadar ingin mengetahui informasi keuangan dari satu perusahaan saja, melainkan dari banyak perusahaan (jika bisa, mungkin dari semua perusahaan) dari seluruh belahan dunia untuk diperbandingkan satu dengan lainnya. Oleh karena itu perlu adanya standar tunggal yaitu International Financial Reporting Standards (IFRS) yang diberlakukan tahun 2012.

Di dunia internasional, IFRS telah diadopsi oleh banyak negara, termasuk negara-negara Uni Eropa, Afrika, Asia, Amerika Latin dan Australia. Di kawasan Asia, Hong Kong, Filipina dan Singapura pun telah mengadopsinya. Sejak 2008, diperkirakan sekitar 80 negara mengharuskan perusahaan yang telah terdaftar dalam bursa efek global menerapkan IFRS dalam mempersiapkan dan mempresentasikan laporan keuangannya. Di Indonesia DSAK sudah lama mengadopsi sedikit demi sedikit IAS atau IFRS tersebut. Dan pada Tahun 2012 SAK telah melakukan konvergensi secara penuh dengan International Financial Reporting Standards (IFRS).

4. Pengesahan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ISAK 35

Pada tanggal 11 April 2019 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia telah mengesahkan ISAK 35 (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020. Dimana sebelumnya untuk organisasi nonlaba diatur dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (PSAK 45) revisi 2017 yang sekarang telah diganti menjadi ISAK 35.

PSAK 45 dengan ISAK 35 terdapat perbedaan, dimana perbedaan yang mendasar yaitu klasifikasi aset neto, yang mana menggabungkan aset neto terikat

permanen dan aset neto terikat temporer menjadi aset neto dengan pembatasan (with restrictions) akan mengurangi kompleksitas dan aset neto tidak terikat menjadi aset neto tanpa pembatasan (without restrictions), oleh karena itu akan membawa pemahaman yang lebih baik dan manfaat lebih besar bagi pengguna laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba.

a. Karakteristik entitas berorientasi nonlaba

Karakteristik entitas berorientasi nonlaba berbeda dengan entitas bisnis berorientasi laba. Perbedaan utama yang mendasar antara entitas berorientasi nonlaba dengan entitas bisnis berorientasi laba terletak pada cara entitas berorientasi nonlaba memperoleh sumber untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya.

Entitas berorientasi nonlaba memperoleh sumber daya dari yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

b. Pengguna laporan keuangan entitas.

Pengguna laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba umumnya memiliki kepentingan untuk menilai:

1. Cara manajemen melaksanakan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka; serta
2. Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomik. Kemampuan entitas berorientasi nonlaba dalam menggunakan sumber daya tersebut dikomunikasikan melalui laporan keuangan.

c. Ruang Lingkup :

1. Interpretasi ini diterapkan untuk entitas berorientasi nonlaba terlepas dari bentuk badan hukum entitas tersebut.
2. Interpretasi ini diterapkan juga oleh entitas berorientasi nonlaba yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
3. Interpretasi ini diterapkan khusus untuk penyajian laporan keuangan.

d. Permasalahan

Interpretasi ini membahas bagaimana entitas berorientasi nonlaba membuat penyesuaian baik:

- a. Penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan; dan
- b. penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri.

e. Interpretasi

1. Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba disusun dengan memperhatikan persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan yang telah diatur dalam PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan.
2. Entitas berorientasi nonlaba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, jika sumber daya yang diterima oleh entitas berorientasi nonlaba mengharuskan entitas untuk memenuhi kondisi yang melekat pada sumber daya tersebut, entitas dapat menyajikan jumlah sumber daya tersebut berdasarkan sifatnya, yaitu pada adanya pembatasan (with restrictions) atau tidak adanya pembatasan (without restrictions) oleh pemberi sumber daya.

3. Entitas berorientasi nonlaba juga dapat menyesuaikan deskripsi yang digunakan atas laporan keuangan itu sendiri. Sebagai contoh, penyesuaian atas penggunaan judul ‘laporan perubahan aset neto’ daripada ‘laporan perubahan ekuitas’. Penyesuaian atas judul laporan tidak dibatasi sepanjang penggunaan judul mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangannya.
4. Entitas berorientasi nonlaba tetap harus mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan relevan dalam menyajikan laporan keuangannya termasuk catatan atas laporan keuangan, sehingga tidak mengurangi kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

f. Tanggal Efektif

Entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020.

4. Ruang Lingkup dan Permasalahan ISAK 35

1. Ruang lingkup ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba memberikan pedoman penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi nonlaba sebagai Interpretasi dari PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 05.
2. Interpretasi ini diterapkan juga oleh entitas berorientasi nonlaba yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
3. Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara spesifik mengenai definisi dan ruang lingkup entitas berorientasi nonlaba tidak ditemukan. Oleh karena itu, DSAK IAI tidak memberikan definisi atau kriteria untuk membedakan entitas berorientasi nonlaba dari entitas bisnis berorientasi laba.
4. Entitas melakukan penilaiannya sendiri untuk menentukan apakah entitas merupakan suatu entitas berorientasi nonlaba, terlepas dari bentuk badan hukum

entitas tersebut, sehingga dapat menerapkan Interpretasi ini. Beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan entitas adalah:

- a. Apakah sumber daya entitas berorientasi nonlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan;
- b. Penghasilan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas berorientasi nonlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas berorientasi nonlaba tersebut;
- c. Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis berorientasi laba, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas berorientasi nonlaba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas berorientasi nonlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas berorientasi nonlaba.

5. Organisasi Nonlaba

1. Pengertian Organisasi Nonlaba

Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. organisasi nirlaba meliputi keagamaan, sekolah, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi sukarelawan.

Menurut ISAK 35 bahwa organisasi nonlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. (IAI, 2017: 45.1)

Lembaga atau organisasi nonlaba merupakan suatu lembaga atau kumpulan dari beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tadi, dalam pelaksanaannya kegiatan yang mereka lakukan tidak berorientasi pada pemupukan laba atau kekayaan semata (Pahala Nainggolan, 2005 : 01). Lembaga nonlaba atau organisasi non profit merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang perannya terasa menjadi penting sejak era reformasi, tanpa disadari kehidupan sehari-hari kini semakin banyak keterlibatan lembaga nirlaba.

Berdasarkan pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa organisasi nirlaba adalah salah satu lembaga yang tidak mengutamakan laba dalam menjalankan usaha atau kegiatannya. Dalam organisasi nonlaba pada umumnya sumber daya atau dana yang digunakan dalam menjalankan segala kegiatan yang dilakukan berasal dari donatur atau sumbangan dari orang-orang yang ingin membantu sesamanya. Tujuan organisasi nirlaba yaitu untuk membantu masyarakat luas yang tidak mampu khususnya dalam hal ekonomi.

Organisasi nonlaba pada prinsipnya adalah alat untuk mencapai tujuan (aktualisasi filosofi) dari sekelompok orang yang memilikinya. Karena itu bukan tidak mungkin diantara lembaga yang satu dengan yang lain memiliki filosofi (pandangan hidup) yang berbeda, maka operasionalisasi dari filosofi tersebut kemungkinan juga akan berbeda. Karena filosofi yang dimiliki organisasi nirlaba sangat tergantung dari sejarah yang pernah dilaluinya dan lingkungan poleksosbud (politik, ekonomi, sosial dan budaya) tempat organisasi nonlaba itu ada.

Dengan demikian maka organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba.

2. Perbedaan Organisasi Nonlaba dengan Organisasi Laba

Banyak hal yang membedakan antara organisasi nonlaba dengan organisasi laba. Dalam hal kepemilikan, tidak jelas siapa sesungguhnya 'pemilik' organisasi nirlaba, apakah anggota, klien, atau donatur. Pada organisasi laba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya.

Dalam hal donatur, organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber pendanaan. Berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas, yakni dari keuntungan usahanya.

Dalam hal penyebaran tanggung jawab, pada organisasi laba telah jelas siapa yang menjadi Dewan Komisaris, yang kemudian memilih seorang Direktur Pelaksana. Sedangkan pada organisasi nonlaba, hal ini tidak mudah dilakukan. Anggota Dewan Komisaris bukanlah 'pemilik' organisasi.

Organisasi nirlaba, non-profit, membutuhkan pengelolaan yang berbeda dengan organisasi profit dan pemerintahan. Pengelolaan organisasi nirlaba dan kriteria-kriteria pencapaian kinerja organisasi tidak berdasar pada pertimbangan ekonomi semata, tetapi sejauh mana masyarakat yang dilayaninya diberdayakan sesuai dengan konteks hidup dan potensi-potensi kemanusiaannya.

Sifat sosial dan kemanusiaan sejati merupakan ciri khas pelayanan organisasi-organisasi nirlaba. Manusia menjadi pusat sekaligus agen perubahan dan pembaruan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan kesejahteraan, kesetaraan gender, keadilan, dan kedamaian, bebas dari konflik dan kekerasan. Kesalahan dan kurang pengetahuan dalam mengelola organisasi nirlaba, justru akan menjebak masyarakat hidup dalam kemiskinan, ketidakberdayaan, ketidaksetaraan gender, konflik dan kekerasan sosial.

Pengelolaan organisasi nirlaba, membutuhkan kepedulian dan integritas pribadi dan organisasi sebagai agen perubahan masyarakat, serta pemahaman yang komprehensif dengan memadukan pengalaman-pengalaman konkrit dan teori manajemen yang handal, unggul dan mumpuni, sebagai hasil dari proses pembelajaran bersama masyarakat.

Dalam konteks pembangunan organisasi nirlaba yang unggul, berkelanjutan dan memberikan energi perubahan dan pembaruan bagi masyarakat, Bernardine R. Wirjana, profesional dalam bidang pemberdayaan masyarakat, yang selama dua dasawarsa menjadi pelaku manajemen organisasi nirlaba, mengabadikan proses pembelajaran atas pengalaman-pengalaman lapangan dan teori-teori manajemen terkini dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

3. Ciri – Ciri Organisasi Nonlaba

- 1) Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atas manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
- 2) Menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
- 3) Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuiditas atau pembubaran entitas.

6. Standar Akuntansi Keuangan

Standar akuntansi keuangan memuat konsep standar dan metode yang dinyatakan sebagai pedoman umum dalam praktik akuntansi perusahaan dalam

lingkungan tertentu. Akuntansi Keuangan di Indonesia disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Indonesia juga telah memiliki Kerangka

Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Jika terdapat pertentangan antara kerangka dasar dan Standar Akuntansi Keuangan maka ketentuan Standar Akuntansi Keuangan yang harus diunggulkan relatif terhadap kerangka dasar ini.

Karena kerangka dasar ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Komite Penyusun Standar Akuntansi Keuangan dalam mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan di masa datang dan dalam peninjauan kembali terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, maka banyaknya kasus konflik tersebut akan berkurang dengan berjalannya waktu (IAI, 2020).

Menurut Rudianto (2012), di Indonesia patokan dalam menyusun laporan keuangan disusun oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dan diberi nama Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sejak tahun 2012 SAK dipilah menjadi dua jenis standar, yaitu :

1. SAK-IFRS SAK ini disusun dengan mengadaptasi IFRS (International Financial Reporting Standards). SAK ini disusun dan diperuntukkan bagi organisasi yang memiliki akuntabilitas publik. Karena itu setiap perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik wajib menggunakan standar ini.
2. SAK-ETAP Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), badan usaha yang tergolong entitas tanpa akuntabilitas publik adalah
 - a. Entitas perorangan
 - b. Persekutuan perdata

- c. Firma
- d. Commanditaire Vennootschap (CV)
- e. Perseroan terbatas, yang tidak memiliki akuntabilitas
- f. Koperasi

Sedangkan menurut penulis Standar Akuntansi Keuangan yang di buat oleh Ikatan Akuntan Indonesia dimasukkan untuk membuat keseragaman dalam membuat laporan keuangan. Namun, tergantung jenis badan usaha apa yang dilakukan oleh perusahaan/badan tersebut. Khususnya perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas secara signifikan yang hanya membuat laporan sederhana yang diatur didalam Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

7. Standar Akuntansi Keuangan Organisasi Nonlaba

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 merupakan standar khusus untuk organisasi Nonlaba. Standar ini disahkan pada tanggal 11 April 2019 dan mulai efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Pada saat pengesahan ISAK 35 Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) juga menerbitkan PPSAK 13 yang berisi pencabutan PSAK 45 pelaporan entitas nirlaba.

Dalam PSAK 45, laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, laporan perubahan aset neto, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam mengklasifikasi aset neto, PSAK 45 membaginya menjadi aset dengan pembatasan yang didalamnya terdapat pembatasan permanen dan pembatasan temporer, dan aset neto tanpa pembatasan.

Sedangkan dalam ISAK 35 terdapat laporan penghasilan komprehensif, klasifikasi aset neto yang digunakan dalam ISAK 35 terbagi menjadi aset neto dengan pembatasan dan aset neto tanpa pembatasan. Karakteristik organisasi Nonlaba sangat berbeda dengan

organisasi bisnis yang berorientasi untuk memperoleh Laba. Perbedaan terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya.

Organisasi memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi yang bersangkutan. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi Nonlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis, contohnya penerimaan sumbangan. Pada beberapa bentuk organisasi Nonlaba meskipun tidak ada kepemilikan, organisasi tersebut mencukupi modalnya dari hutang dan mendanai operasionalnya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik.

Berikut ini adalah pengertian-pengertian menurut Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35 :

1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi Nonlaba . Pihak pengguna laporan keuangan organisasi Nonlaba memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai (IAI, 2018).

Menurut Rudianto (2012), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi atau siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Menurut Wardhana (2014) secara rinci, tujuan laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan, adalah untuk menyajikan informasi mengenai: (1) Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi. (2) Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih. (3) Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya. (4) Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya. (5) Usaha jasa suatu organisasi.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2015) tujuan laporan keuangan itu sebagai berikut : (1) Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal perusahaan. (2) Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya (3) Untuk memberikan informasi yang berguna

2. Unsur-Unsur Laporan Keuangan Nonlaba

Laporan keuangan organisasi Nonlaba menurut Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No. 35 yang bersumber pada buku Standar Akuntansi Keuangan meliputi:

A. Laporan Posisi Keuangan

Menurut Rudianto (2012), Laporan posisi keuangan adalah daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Menurut Henry (2016), Tujuan keseluruhan dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan.

Menurut Nelson Law dan Peter Lau (dalam Astikaningrum 2017), unsur1 unsur aset, kewajiban dan ekuitas berkaitan dengan pengukuran posisi keuangan dalam laporan posisi keuangan, hal tersebut didefinisikan sebagai berikut : (a) Aset adalah sumber daya yang dapat dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa

lalu dan diharapkan akan mengalir manfaat ekonomi. (b) Kewajiban adalah kewajiban kini dari entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diperkirakan berakibat pada 10 arus keluar dari entitas berupa sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi. (c) Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah di kurangi oleh semua liabilitas.

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan, dan informasi dalam laporan keuangan lain dapat membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain untuk menilai (IAI, 2020).

1. Kemampuan entitas lain untuk memberikan jasa secara berkelanjutan
2. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Laporan posisi keuangan mencakup entitas nonlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto.

(a) Klasifikasi Aset dan Liabilitas

Laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aset dan liabilitas. Informasi tersebut umumnya disajikan dengan pengumpulan aset dan liabilitas yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen. Sebagai contoh, entitas nonlaba biasanya melaporkan masing-masing unsur aset dalam kelompok yang homogen seperti :

- 1) Kas dan setara kas
- 2) Piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa lain
- 3) Persediaan

- 4) Sewa, asuransi, dan jasa lain yang dibayar dimuka
- 5) Instrument keuangan dan investasi jangka panjang
- 6) Tanah, gedung, peralatan, serta aset tetap lain yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.

Kas atau aset lain yang dibatasi penggunaannya oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali disajikan terpisah dari kas atau aset lain yang tanpa pembatasan penggunaannya. Informasi likuiditas diberikan dengan cara sebagai berikut : (1) Menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas, dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo. (2) Mengelompokkan aset kedalam kelompok lancar dan tidak lancar, dan liabilitas ke dalam kelompok jangka pendek dan jangka panjang. (3) Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh tempo liabilitas, termasuk pembatasan penggunaan aset, dalam catatan atas laporan keuangan.

(b) Klasifikasi Aset dengan pembatasan atau tanpa pembatasan

Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan pada ada atau tidaknya pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, yaitu: aset dengan pembatasan atau tanpa pembatasan. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.

Aset dengan pembatasan, seperti tanah atau karya seni, yang diberikan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual atau aset yang diberikan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen

dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset neto yang penggunaannya dibatasi secara permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pembatasan permanen kelompok kedua tersebut berasal dari hibah atau wakaf dan warisan yang menjadi dana abadi. Dan terdapat didalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset. Sedangkan aset tanpa pembatasan, berupa aset yang dapat dipergunakan bebas oleh yayasan dan diperbolehkan untuk dijual untuk memenuhi kebutuhan yayasan, dan terdapat didalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset.

^ B. Laporan Aktivitas

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode; menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan entitas Nonlaba dan memberikan jasa, dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

(a) Perubahan Kelompok Aset Neto

Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aset dengan pembatasan dan tanpa pembatasan dalam suatu periode. Pendapatan dan keuntungan yang

menambah aset neto, serta beban dan kerugian yang mengurangi aset neto dikelompokkan sebagaimana yang diatur sub bagian yang bertanda .

- (b) Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aset neto tanpa pembatasan, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, dan menyajikan beban sebagai pengurang aset neto tanpa pembatasan. Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto, kecuali diatur berbeda oleh SAK atau SAK ETAP. Laporan aktivitas menyajikan jumlah neto keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi insidental atau peristiwa lain yang berada di luar pengendalian entitas nonlaba dan manajemen. Misalnya, keuntungan atau kerugian penjualan tanah dan gedung yang tidak digunakan lagi.
- (c) Informasi Pemberi Jasa Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Klasifikasi secara fungsional bermanfaat untuk membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain dalam menilai pemberian jasa dan penggunaan sumber daya. Program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada penerima manfaat, pelanggan, atau anggota dalam rangka mencapai tujuan atau misi entitas nonlaba . Pemberian jasa tersebut merupakan tujuan dan hasil utama yang dilaksanakan melalui berbagai program utama. Aktivitas pendukung meliputi semua aktivitas selain program pemberian jasa.

C. Laporan Arus Kas

Tujuan utama dalam laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode. Laporan Arus Kas disajikan Sesuai dengan ISAK 2 : Laporan Arus Kas atau SAK ETAP Bab 7 dengan tambahan sebagai berikut ini : a. Aktivitas pendanaan. b. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas, misalnya sumbangan berupa bangunan atau aset investasi.

D. Catatan atas laporan keuangan

Tujuan utama catatan atas laporan keuangan adalah memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas, laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan keuangan entitas Nonlaba.

8. Karakteristik organisasi Nonlaba

Karakteristik organisasi Nonlaba dalam menjalankan operasinya tidak bertujuan untuk menghasilkan Laba atau keuntungan. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap struktur, visi serta misi dari organisasi Nonlaba. Sebuah organisasi Nonlaba harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: (1) Sumber daya entitas Nonlaba berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan dana yang telah diberikan. (2) Menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan menumpuk Laba, dan jika entitas Nonlaba menghasilkan Laba, maka tidak akan dibagi kepada para pendiri atau pemilik entitas Nonlaba tersebut. (3) Tidak ada kepemilikan lazim pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan entitas Nonlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas Nonlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas Nonlaba (IAI, 2018).

Menurut Wardhana (2014) karakteristik organisasi Nonlaba meliputi : (a) Tidak adanya pengukuran Laba (b) Tidak selalu bergantung pada keuntungan pasar (c) Ketiadaan komparatif pertanggungjawaban.

Sedangkan menurut penulis berdasarkan karakteristik tersebut mengenai perbedaan organisasi Nonlaba dan organisasi Laba, dimana dalam organisasi Laba pemilik jelas menarik keuntungan dari hasil usaha organisasinya. Dalam hal donatur, organisasi Nonlaba membutuhkannya sebagai sumber pendanaan. Berbeda dengan organisasi Laba yang memiliki sumber pendanaan yang jelas yakni dari keuntungan usahanya.

Dalam hal penyebaran tanggung jawabnya telah jelas siapa yang menjadi Dewa Pengawasnya, yang kemudian memilih Direktur Pelaksanaan. Sedangkan pada organisasi Nonlaba, hal ini tidak mudah dilakukan. Tindakan donatur untuk memastikan akuntabilitas dalam organisasi Nonlaba penerimaan dana antara lain : (1) Memantau aktivitas organisasi Nonlaba (2) Kunjungan donatur ke lokasi kegiatan (3) Meminta organisasi penerimaan dana membuat laporan keuangan dan laporan kegiatan (4) Membandingkan anggaran dengan realisasi anggaran untuk mengevaluasi penggunaan dana (5) Mewajibkan penerima dana untuk menyerahkan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik (6) Mengirim auditor untuk mengaudit laporan keuangan penerimaan dana.

Akuntabilitas yang dapat diberikan oleh organisasi penerimaan dana, seperti:

1. Membuat dokumentasi kegiatan, misalkan berupa foto kegiatan, pembuatan daftar hadir dalam pelaksanaan kegiatan, pembuatan video untuk merekam aktivitas.
2. Membuat catatan keuangan yang rapi, yang didukung dengan pengarsipan bukti transaksi keuangan yang rapi.
3. Menyerahkan laporan ke donatur tepat waktu (sesuai dengan yang disajikan).

9. Gereja Gerakan Pentakosta Pengelola Pendidikan

Istilah Gereja. Gereja adalah suatu kata Bahasa Indonesia yang berarti suatu perkumpulan atau lembaga dari penganut iman Kristiani. Gereja merupakan misteri, sakramen keselamatan dan Umat Allah yang dalam perjalanan ziarah bersama menuju kehidupan kekal.

Kata Gereja berasal dari bahasa Protugis: igreia, yang berasal dari bahasa Yunani: εκκλησία (ekklêsia) yang berarti dipanggil keluar (ek= keluar; klesia dari kata kaleo = memanggil); kumpulan orang yang dipanggil ke luar dari dunia) memiliki beberapa arti:

- a. Arti pertama ialah 'umat' atau lebih tepat persekutuan orang Kristen. Arti ini diterima sebagai arti pertama bagi orang Kristen. Jadi, gereja pertama-tama bukanlah sebuah gedung. Gereja (untuk arti yang pertama) terbentuk 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus pada hari raya Pentakosta, yaitu ketika Roh Kudus yang dijanjikan Allah diberikan kepada yang percaya pada Yesus Kristus.
- b. Arti kedua adalah sebuah perhimpunan atau pertemuan ibadah umat Kristen. Bisa bertempat di rumah kediaman, lapangan, ruangan di hotel, maupun tempat rekreasi.
- c. Arti ketiga ialah mazhab (aliran) atau denominasi dalam agama Kristen. Misalnya: Gereja Katolik, Gereja Protestan.
- d. Arti keempat ialah lembaga (administratif). Contoh kalimat “Gereja menentang adanya peperangan di muka bumi.
- e. Arti terakhir adalah sebuah “rumah ibadah” umat Kristen, di mana umat bisa berdoa atau bersembahyang.

Pemahaman tentang Gereja juga bisa dilihat dalam arti rohani dan arti fisik. Berdasarkan artinya itu, maka Gereja adalah:

- a. Arti Rohani

- 1) Umat yang dipanggil Tuhan
- 2) Persekutuan semua orang di seluruh dunia yang percaya akan Yesus Kristus itu Putra Allah dan satu-satunya Penyelamat kita.
- 3) Himpunan yang didalamnya terdapat Umat Allah, Tubuh Kristus dan Bait Roh Kudus (bdk 1 Kor 10:32, 11:17-22, 15:9).
- 4) Himpunan orang-orang yang digerakan untuk berkumpul oleh Firman Allah, yakni berhimpun bersama untuk membentuk Umat Allah dan yang diberi santapan dengan Tubuh Kristus menjadi umatNya atau Gereja.

b. Arti Fisik

Gereja adalah bangunan tempat ibadah persekutuan Umat yang beriman kepada Kristus. Bagi Paulus, Gereja adalah jemaat setempat namun juga mempunyai arti universal. Karena itu, didalam jemaat setempat terwujudlah Gereja Allah. Dalam pemahaman gereja Paulus, orang tidak pergi ke Gereja untuk beribadat. Perayaan bersama adalah Gereja, oleh karena perayaan itu tidak lain dari pada “berkumpul sebagai jemaat” orang tidak berkumpul untuk ibadah atau untuk taurat. Hidup jemaat dalam kondisi persaudaraan yang bertujuan untuk komunikasi iman, saling meneguhkan dan menguatkan iman.

c. Tugas Gereja melaksanakan tugas pendidikan

Salah satu tujuan tugas Gereja adalah menjadikan semua umat Tuhan menjadi Murid, seperti ungkapan Tuhan Yesus sebelum Ia terakat ke Surga, dalam Injil Matius 28:19 “Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridKu.....” Gereja pada hakekatnya memiliki tanggung jawab untuk mengelola Sekolah atau pendidikan. Itulah yang dilaksanakan oleh Gereja Gerakan Pentakosta di Sulawesi Utara mengelola Sekolah Menengah Teologi Kristen SMTK “Elshaddai” Mooat Sulawesi Utara. Penulis sebagai warga Gereja merasa berkepentingan melalui

penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada Gereja agar dalam pengelolaan pertanggungjawaban keuangan dapat dilakukan dengan baik

II. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang berhubungan dengan penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) 35 pada organisasi Nonlaba telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga beberapa point penting dari hasil penelitian dapat dijadikan dasar dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang dapat dilihat sebagai berikut:

1) Ismi Darojatul Ula (2020)

Dalam penelitiannya dengan judul “Penerapan Isak 35 Pada Masjid Baitul Hidayah Puger Jember”, dengan Variabel “Laporan Keuangan Masjid Baitul Hidayah Puger” pada Indikator ISAK No. 35, mendapatkan hasil: Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar pencatatan yang diterapkan di Masjid Baitul Hidayah Puger adalah menggunakan basis kas. Siklus akuntansi pada Masjid Baitul Hidayah Puger belum lengkap dan belum berurutan sesuai dengan standar yang berlaku. Dipublikasikan melalui Skripsi di Universitas Muhammadiyah Jember (2020)

2) Sollahudin Ghozali (2021)

Dalam penelitiannya dengan judul “Penerapan Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 (Studi Kasus Pada Organisasi Pemuda Peduli Dhuafa Di Gresik Tahun 2020)”, dengan Variabel “Laporan keuangan Organisasi Pemuda Peduli Dhuafa Gresik” pada Indikator ISAK No. 35, mendapatkan hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan organisasi Pemuda Peduli Dhuafa tahun 2020 hanya menyajikan laporan hasil kegiatan, laporan bulanan, dan laporan tahunan secara sederhana yakni pemasukan dan pengeluaran. Organisasi belum menerapkan pedoman penyajian laporan keuangan secara umum maupun secara khusus yakni ISAK 35. Dipublikasikan melalui Skripsi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

3) Nofi Lasfita, Muslimin (2020)

Dalam penelitiannya dengan judul “Penerapan Isak No. 35 Pada Organisasi Keagamaan Masjid Al-Mabrur Sukolilo Surabaya”, dengan Variabel “Laporan Keuangan Organisasi Keagamaan Masjid Al-Mabrur” pada Indikator ISAK No. 35, mendapatkan hasil: Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masjid Al-Mabrur Surabaya masih belum menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK No. 35. Dipublikasikan melalui Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik, Volume 1, no. 35 (2020).

4) Ridick Christian Poluakan (2020)

Dalam penelitiannya dengan judul “Analisis Implementasi ISAK No. 35 pada Laporan Keuangan Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado”, dengan Variabel “Laporan Keuangan Yayasan Pendidikan Katolik” pada Indikator ISAK No. 35, mendapatkan hasil: Hasil Penelitian menunjukan bahwa Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manadi (YPKKM) belum menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 35. Dipublikasikan melalui Skripsi di Universitas Katolik De La Salle Manado.

5) Sri Nelva Susanti (2020)

Dalam penelitiannya dengan judul “Analisis Penerapan Isak No. 35 Terhadap Laporan Keuangan Pada Yayasan Mts Al-Manar Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Periode 2018- 2019”, dengan Variabel “Laporan keuangan Pada Yayasan Mts Al-Mana” pada Indikator ISAK No. 35, mendapatkan hasil: Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar pencatatan yang diterapkan di Yayasan MTS Al-Manar Pujud adalah menggunakan basis kas. Siklus akuntansi pada Yayasan MTS Al-Manar Pujud belum lengkap dan belum berurutan sesuai dengan standar yang berlaku. Dipublikasikan melalui Skripsi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarifkasim Riau.

Dari beberapa penelitian di atas menurut PSAK 1 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018) laporan keuangan hendaknya menampilkan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Selain itu, laporan keuangan juga merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi. Tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan kontribusi kepada pemilik dan arus kas yang disertakan dengan informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan ISAK 35, laporan keuangan yang dihasilkan dari siklus akuntansi entitas berorientasi nonlaba antara lain: **Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.** Laporan-laporan tersebut uraiannya adalah sebagai berikut:

1) Laporan Posisi Keuangan

a. Laporan Posisi Keuangan (Format A)

Pada laporan posisi keuangan Format A, Entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya (misalnya, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).

b. Laporan Posisi Keuangan (Format B)

Pada laporan posisi keuangan format B mencakup jumlah penghasilan komprehensif lain (entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan

kelas aset netonya, misalnya, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan

2) Laporan Penghasilan Komprehensif

Laporan yang menyajikan laporan laba rugi untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangan selama periode tersebut. Dimana laporan ini juga mengatur informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi seperti penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi:

- a. Pendapatan
- b. Beban keuangan
- c. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metod ekui
- d. Beban pajak
- e. Laba rugi atau rugi neto

3) Laporan perubahan Aset Neto

Dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan interpretasi standar akuntansi keuangan (ISAK 35) merupakan laporan perubahan aset neto menyajikan informasi aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Berikut contoh laporan perubahan aset neto.

Pada laporan perubahan aset neto entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya (misalnya jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).

4) Laporan arus kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasional,

aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Informasi tentang arus kas berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan masjid dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan pengguna arus kas tersebut. Laporan arus kas disajikan sesuai dengan dasar pengaturan SAK ETAP Bab 7 dengan tambahan berikut ini:

1. Aktivitas Operasi

Aktivitas penghasil utama pendapatan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

2. Aktivitas Investasi

Aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.

3. Aktivitas Pendanaan

Penerimaan kas dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali yang penggunaannya dibatasi dalam jangka panjang, Penerimaan kas dari pemberi sumber daya dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pembangunan dan pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan dana abadi dan imbal hasil dan dividen yang dibatasi penggunaannya dalam jangka panjang.

4. Laporan arus kas

Laporan arus kas memiliki tujuan yaitu menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Laporan arus kas melaporkan arus kas dan disajikan berdasarkan tiga aktivitas yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Metode pembuatan laporan arus terbagi dua yaitu laporan arus kas metode langsung dan laporan arus kas metode tidak langsung.

a. Laporan arus kas (metode langsung)

Adapun bentuk Laporan Arus Kas yang disajikan dengan metode tidak langsung menurut ISAK No. 35 adalah sebagai berikut

b. Laporan arus kas (metode tidak langsung)

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan-laporan di atas. Bertujuan memberikan informasi tambahan tentang perkiraan-perkiraan yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini berupa perincian dari suatu perkiraan yang disajikan seperti misalnya aset tetap. Catatan atas laporan keuangan memberikan rincian nama aset, liabilitas, aset neto. Misalnya, untuk aset tetap di catatan atas laporan keuangan akan dijelaskan untuk menghitung penyusutan aset tetap, serta kebijakan akuntansi lainnya yang digunakan oleh entitas tersebut.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif. CALK juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

1. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
2. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan laba-rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.
3. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. (IAI, 2007: 1.13)

Contoh Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan A menguraikan kebijakan pengungkapan yang diwajibkan yang menyebabkan Catatan B wajib disajikan. Catatan C, D dan E menyediakan informasi yang dianjurkan

untuk diungkapkan oleh entitas berorientasi nonlaba. Semua jumlah dalam jutaan rupiah.

Catatan A

Entitas menyajikan hibah, berupa kas atau aset lain, sebagai sumbangan dengan pembatasan, jika hibah tersebut diterima dengan persyaratan pembatasan baik untuk penggunaan aset atau atas manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh dari aset tersebut.

Jika pembatasan dari pemberi sumber daya telah kedaluwarsa, yaitu pada saat masa pembatasan telah berakhir atau pembatasan penggunaan telah dipenuhi, maka aset neto dengan pembatasan digolongkan kembali menjadi aset neto tanpa pembatasan dan disajikan dalam laporan perubahan aset neto sebagai aset neto yang dibebaskan dari pembatasan.

Entitas menyajikan hibah, berupa tanah, bangunan dan peralatan sebagai sumbangan tanpa pembatasan, kecuali jika ada pembatasan yang secara eksplisit menyatakan tujuan pemanfaatan aset atau penggunaan manfaat ekonomik masa depan yang diperoleh dari aset dari pemberi sumber daya.

Hibah atau untuk aset tetap dengan pembatasan secara eksplisit yang menyatakan tujuan pemanfaatan aset tersebut dan sumbangan berupa kas atau aset lain yang harus digunakan untuk memperoleh aset tetap disajikan sebagai sumbangan dengan pembatasan.

Catatan B

Aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya yang dibatasi

Catatan C

Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan pemberi sumber daya karena terjadinya

beban tertentu yang memenuhi tujuan pembatasan atau tercapainya periode waktu atau kejadian lain yang disyaratkan oleh pemberi sumber daya.

III. KERANGKA BERPIKIR

Kerangka Pemikiran 24 Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 merupakan standar khusus untuk organisasi Nonlaba. Karakteristik organisasi Nonlaba sangat berbeda dengan organisasi bisnis yang berorientasi untuk memperoleh Laba.

Perbedaan terletak pada cara organisasi Nonlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Sedangkan pada organisasi Nonlaba akuntabilitas dan responsibility (tanggung jawab) sangatlah penting karena kecenderungan yang menjadi isu utama dalam organisasi Nonlaba saat ini secara praktek sudah tidak memenuhi kaidah-kaidah organisasi Nonlaba lebih cenderung mengarah kepada organisasi profit.

Salah satu yang menyimpang yang berupa penghindaran pajak serta earning management dapat dilakukan melalui organisasi Nonlaba. Maka dari itu perlunya melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku yaitu ISAK 35 untuk tujuan laporan keuangan yaitu menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nonlaba.

Penelitian ini menerapkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) 35 tentang entitas nonlaba pada laporan keuangan Sekolah Menengah Teologi Kristen SMTK “Elshaddai” Mooat - Sulawesi Utara.

Kerangka berpikir digambarkan sebagai berikut

